

## PERAN MAHASISWA DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS ANGGARAN BERSAMA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

Febi Nadila Agnesa<sup>\*1</sup>, Titi Darmi<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: \* [febinadilaagnesa25@gmail.com](mailto:febinadilaagnesa25@gmail.com) , [titidarmi@umb.ac.id](mailto:titidarmi@umb.ac.id)

### ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang menekankan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini membahas peran mahasiswa dalam mendorong akuntabilitas anggaran melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi, penyusunan materi, serta sosialisasi interaktif berbasis presentasi, diskusi kelompok, dan evaluasi kuisioner. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator diskusi yang mampu meningkatkan pemahaman aparat kejaksaan mengenai pentingnya akuntabilitas anggaran. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, antusiasme, serta lahirnya komitmen internal untuk memperkuat budaya akuntabilitas. Dengan demikian, kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum dapat menjadi strategi efektif dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Mahasiswa, KKN, Akuntabilitas Anggaran, Kejaksaan, Transparansi.

### I. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang mengintegrasikan aspek pendidikan, penelitian, dan pelayanan publik. Dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Akuntabilitas anggaran merupakan isu penting dalam sektor publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kejaksaan Tinggi sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi serta memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, kolaborasi antara mahasiswa dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu diharapkan dapat memperkuat

kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran.

Latar belakang kegiatan ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman internal aparat kejaksaan mengenai konsep akuntabilitas anggaran, baik dari sisi normatif maupun praktis. Mahasiswa yang terlibat dalam KKN dapat menjadi jembatan penyampai informasi dengan cara yang sederhana, komunikatif, dan edukatif.

Selain itu, mahasiswa juga dapat membawa perspektif akademik dan hasil kajian yang dapat memperkaya praktik pengelolaan anggaran di Kejaksaan Tinggi. Dengan mengedepankan metode sosialisasi dan diskusi, mahasiswa dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman baru yang relevan dengan dinamika hukum dan tata kelola keuangan negara.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif di

kalangan aparat kejaksaan untuk menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan hanya sekadar kewajiban administratif. Hal ini penting untuk membangun citra kejaksaan sebagai lembaga yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Dengan demikian, tulisan ini akan memaparkan bagaimana peran mahasiswa dalam KKN mampu berkontribusi secara nyata dalam mendorong akuntabilitas anggaran, melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola kelembagaan.

## II. METODE KEGIATAN

Kegiatan KKN ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra diskusi bagi aparat Kejaksaan Tinggi. Pendekatan ini bertujuan agar kegiatan dapat berlangsung secara interaktif dan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman serta pandangannya.

Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi awal dan diskusi bersama pihak Kejaksaan Tinggi. Observasi ini berfokus pada tingkat pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas anggaran, tantangan yang dihadapi, serta harapan yang ingin dicapai dari kegiatan sosialisasi.



**Gambar 1.** Mahasiswa berdiskusi dengan pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam tahap awal koordinasi kegiatan KKN.



**Gambar 2.** Proses telaah bersama antara mahasiswa dan aparat kejaksaan terhadap data dan laporan anggaran sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi.

Dokumentasi kegiatan awal menunjukkan proses koordinasi mahasiswa dengan pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam tahap observasi dan penyusunan materi sosialisasi. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan diskusi intensif untuk memahami kebutuhan lembaga terkait akuntabilitas anggaran serta menyiapkan konsep kegiatan yang sesuai dengan prinsip partisipatif. Proses ini memperlihatkan sinergi antara mahasiswa dan aparat kejaksaan dalam mengidentifikasi permasalahan sekaligus menyusun strategi edukasi yang efektif.

Selanjutnya, mahasiswa menyusun materi sosialisasi yang meliputi konsep dasar akuntabilitas anggaran, regulasi terkait, praktik terbaik (*best practices*), serta strategi pencegahan penyalahgunaan anggaran. Materi ini disusun dalam bentuk presentasi visual, modul singkat, dan contoh kasus nyata agar mudah dipahami.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi tatap muka yang berlangsung di aula Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kegiatan ini menggunakan metode presentasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Hal ini bertujuan menciptakan komunikasi dua arah serta meningkatkan pemahaman peserta terhadap isu yang disampaikan.

Untuk memastikan efektivitas kegiatan, mahasiswa juga menyiapkan

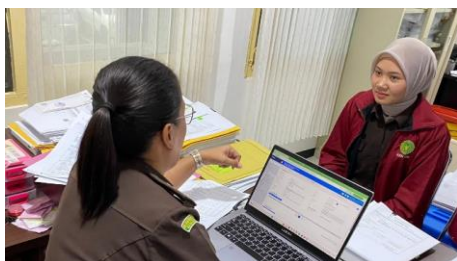
instrumen evaluasi berupa kuis singkat yang diberikan sebelum dan sesudah sosialisasi. Instrumen ini membantu mengukur peningkatan pemahaman peserta serta menilai keberhasilan penyampaian materi.

Seluruh proses kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan dukungan dari dosen pembimbing lapangan dan pihak Kejaksaan, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pembelajaran bersama serta implementasi nilai-nilai akuntabilitas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berhasil dilaksanakan dengan dihadiri oleh pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu, mulai dari pejabat struktural hingga staf administrasi. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi, terutama ketika membahas tantangan pengelolaan anggaran di lingkungan kejaksaan.

Foto-foto kegiatan di bawah ini memperlihatkan suasana aktif selama pelaksanaan sosialisasi dan diskusi kelompok. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang mendorong pegawai kejaksaan untuk memahami dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Melalui pendampingan teknis, simulasi, dan pencatatan hasil diskusi, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman peserta, tetapi juga menumbuhkan komitmen internal terhadap budaya kerja yang transparan dan akuntabel.



**Gambar 3.** Mahasiswa memberikan pendampingan teknis mengenai pencatatan keuangan berbasis digital kepada pegawai Kejaksaan Tinggi.



**Gambar 4.** Sesi diskusi interaktif tentang penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas anggaran di lingkungan kejaksaan.



**Gambar 5.** Mahasiswa melakukan pencatatan hasil wawancara serta umpan balik dari peserta sosialisasi untuk keperluan evaluasi kegiatan.

Foto-foto kegiatan di bawah ini memperlihatkan suasana aktif selama pelaksanaan sosialisasi dan diskusi kelompok. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang mendorong pegawai kejaksaan untuk memahami dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Melalui pendampingan teknis, simulasi, dan pencatatan hasil diskusi, kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman peserta, tetapi juga menumbuhkan komitmen internal terhadap budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Pada awal kegiatan, mahasiswa memaparkan konsep dasar akuntabilitas anggaran dan relevansinya dalam konteks lembaga penegak hukum. Materi ini dikaitkan dengan prinsip good governance dan upaya pemberantasan korupsi,



sehingga peserta dapat memahami keterkaitannya secara lebih komprehensif.

Selama sosialisasi, mahasiswa juga memberikan contoh nyata terkait penyalahgunaan anggaran yang pernah terjadi di instansi publik lain, serta bagaimana akuntabilitas yang kuat mampu mencegah terjadinya kasus serupa. Pendekatan ini menimbulkan diskusi yang hidup karena peserta dapat merefleksikan kondisi di institusinya.

Aktivitas sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok di mana peserta diajak mengidentifikasi potensi kendala dalam penerapan akuntabilitas anggaran di lingkungan kejaksaan. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator diskusi, mencatat temuan-temuan penting, serta menyarankan solusi praktis yang dapat diterapkan.

Berdasarkan evaluasi melalui kuisisioner, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep akuntabilitas anggaran. Peserta juga memberikan umpan balik positif terhadap metode penyampaian yang interaktif, serta mengapresiasi peran mahasiswa dalam menghadirkan perspektif akademik yang relevan.

Temuan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa melalui program KKN tidak hanya berkontribusi dalam hal edukasi, tetapi juga mendorong lahirnya komitmen internal di kalangan aparat kejaksaan untuk memperkuat budaya akuntabilitas. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kerja sama lebih lanjut antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum.



**Gambar 6.** Penyerahan laporan hasil kegiatan dan rekomendasi peningkatan akuntabilitas anggaran kepada perwakilan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.



**Gambar 7.** Pendampingan mahasiswa dalam meninjau data akuntabilitas anggaran menggunakan perangkat digital bersama pegawai kejaksaan.

Dokumentasi akhir menunjukkan kegiatan penutupan sekaligus penyerahan laporan hasil observasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Momen ini menegaskan keberhasilan kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat akuntabilitas publik. Mahasiswa tidak hanya berhasil melaksanakan tugas akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi di lingkungan birokrasi pemerintah.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan KKN dengan tema mendorong akuntabilitas anggaran di Kejaksaan Tinggi Bengkulu menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola

kelembagaan. Melalui sosialisasi, mahasiswa berhasil meningkatkan pemahaman aparat kejaksaan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Mahasiswa tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator diskusi yang mampu menggali permasalahan aktual di lapangan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan nilai tambah baik bagi mahasiswa sebagai agen perubahan, maupun bagi kejaksaan sebagai institusi publik.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta sosialisasi mengalami peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai akuntabilitas anggaran. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif selama diskusi serta evaluasi kuisioner yang menunjukkan perubahan signifikan pada pemahaman mereka.

Kesimpulan penting dari kegiatan ini adalah bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sinergi ini perlu terus dikembangkan agar mampu menghasilkan dampak yang lebih luas.

Adapun saran bagi pihak kejaksaan adalah untuk menjadikan akuntabilitas anggaran sebagai budaya kerja yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar pemenuhan administratif. Peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan rutin juga dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat budaya tersebut.

Bagi perguruan tinggi, kegiatan serupa perlu terus didorong sebagai bentuk nyata pengabdian masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam isu strategis seperti akuntabilitas anggaran tidak hanya bermanfaat bagi institusi mitra, tetapi juga memperkaya pengalaman mahasiswa dalam menerapkan ilmu di ranah praktis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan KKN serta membuka ruang kolaborasi dalam upaya mendorong akuntabilitas anggaran.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa penulis menghargai partisipasi aktif seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang telah berkontribusi dalam sosialisasi serta diskusi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus. (2017). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2011 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Akuntabilitas Anggaran*. Jakarta: KPK RI.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004  
tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara.

Wibowo, H. (2021). *“Peran Perguruan  
Tinggi dalam Mendorong  
Transparansi dan Akuntabilitas  
Publik.”* Jurnal Administrasi  
Publik, 15(2), 112–124.